

**PERAN GREENPEACE DALAM MENANGANI KERUSAKAN HUTAN
AKIBAT DEFORESTASI DI INDONESIA PADA MASA
MORATORIUM HUTAN**

Oleh : Widri Khairani

widri.khairani@student.unri.ac.id

Pembimbing : Irwan Iskandar S.IP., MA

Bibliografi : 11 Buku, 16 Jurnal, 8 Laporan, 41 Websites

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28294 Telp/Fax 0761-632277

ABSTRACT

The Indonesian government has a Forest Moratorium policy that has been in effect since 2011. However, until the moratorium policy was made permanent in 2019, deforestation still occurred in Indonesia, including in areas protected by the moratorium. To understand how an international non-governmental organization Greenpeace has played a role in dealing with forest destruction due to deforestation in Indonesia.

Based on the theory of the role of international organizations at the level of group analysis with descriptive qualitative research methods, using primary data obtained through interviews, the official website of Greenpeace and related Ministries as well as secondary data from books, journals, and reports related to forest destruction in Indonesia.

The results showed that in dealing with forest damage due to deforestation during the forest moratorium, Greenpeace actively carried out direct forest campaigns on the Mata Harimau Tour in Sumatra and Kalimantan collecting data on the moratorium on forests damaged by deforestation, campaigning online through websites and social media, and opening forest data. the moratorium is reduced due to deforestation, meet with relevant parties to influence the implementation of the moratorium policy so that zero deforestation is realized in Indonesia..

Keywords : Forest Moratorium policy, Greenpeace, Deforestation

PENDAHULUAN

Isu lingkungan yang mendapatkan perhatian khusus di Indonesia adalah permasalahan deforestasi hutan dan eksploitasi lahan. Deforestasi merupakan sebuah kegiatan penggundulan hutan atau pengalihan fungsi hutan dengan tujuan lain seperti industri pertanian, perkebunan dan pembangunan kota. Meningkatnya pembangunan diberbagai sektor untuk menunjang perekonomian suatu negara inilah yang terkadang berlangsung dengan cara mengabaikan dan mengancam lingkungan.¹

Terkait dengan munculnya isu lingkungan dalam kajian Hubungan Internasional dapat menjadi cerminan dari perkembangan lingkungan global. Kasus ini termasuk juga ke dalam isu kontemporer khususnya mengenai lingkungan yang sangat menarik untuk diteliti dan tepat dengan konsentrasi yang ada pada Ilmu Hubungan Internasional yaitu kontemporer.

Pada konvensi PBB menyatakan dengan tegas bahwa sebagian umat manusia bertanggung jawab lebih dalam mempercepat proses perubahan iklim.

Prinsip yang menjadi *raison d'etere* oleh UNFCCC yaitu *Common but Differentiated Responsbillity* atau tanggung jawab yang berlaku umum namun berbeda kadarnya dalam perkembangnya tidak membebaskan tanggung jawab hanya kepada negara maju semata, namun juga mulai dibebankan kepada negara berkembang untuk mengambil peran dalam agenda global ini mengingat negara berkembang juga ikut menyebabkan emisi gas rumah kaca terutama akibat deforestasi dan pembakaran lahan gambut.²

Skema ini lalu berubah menjadi REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*) yang kemudian kita kenal sebagai REDD+ dengan memasukan konservasi hutan sebagai bagian dari skema ini.³ Skema dari REDD+ dianggap perlu untuk menjadi bagian dari mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Mengingat pada pelaksanaan COP 21 di Paris (*Paris Agreement*), Indonesia dan beberapa negara lainnya telah berkomitmen dengan *nationally determined contribution* dengan tujuan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% melalui upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030.⁴

Greenpeace dikenal sebagai organisasi yang menggunakan aksi langsung dengan prinsip tanpa disertai kekerasan, independensi sumber keuangan, konfrontasi langsung dan kekuatan aksi bersamanya. *Greenpeace* berusaha untuk mempengaruhi perilaku pemerintah dan pihak-pihak perusahaan atau industri yang dalam pelaksanaan kegiatannya mengabaikan lingkungan.⁵

Greenpeace masuk ke Asia Tenggara secara resmi pada tahun 2000 dengan melihat banyaknya populasi spesies tanaman dan hewan dilindungi di area ini, namun

Agustus 2021 diakses melalui <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/tentang/amanat-perubahan-iklim/komitmen-indonesia> pukul 14.25WIB

³ Mumu Muhajir. (2010) "*REDD Di Indonesia, Kemana Akan Melangkah?*", Jakarta: HuMA .. Hal 1-5.

⁴ FH UNPAD, "*Lika-Liku Pelaksanaan REDD+ Di Indonesia : Efektifkah Atasi Deforestasi?*", Pada tanggal 4 Agustus 2021 diakses melalui <https://fh.unpad.ac.id/like-liku-pelaksanaan-redd-di-indonesia-efektifkah-atasi-deforestasi/> pukul 16.35 WIB

⁵ *Greenpeace* Internasional, "*Our Core Values*", pada tanggal 5 Agustus 2021 diakses melalui <http://www.Greenpeace.org/international/en/about/our-core-values/> pukul 14.00 WIB

¹ Robert Jackson and Georg Sorensen, (2009), "*Pengantar Studi Hubungan Internasional*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 272-273.

² Ditjen PPI- KLHK, *Komitmen Indonesia Dalam Pengendalian Perubahan Iklim*, pada tanggal 4

keberadaannya semakin terancam karena adanya perubahan iklim dan deforestasi. Hal ini yang mendasari fokus utama *Greenpeace* di Kawasan Asia tenggara khususnya di Indonesia yaitu melindungi hutan Indonesia dan revolusi energi berkelanjutan.

Kasus deforestasi dan perusakan lingkungan yang meningkat menyebabkan kekhawatiran manusia akan kondisi lingkungan dimasa yang akan datang. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerusakan hutan terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh deforestasi dan eksploitasi lahan dengan mengaitkannya dengan kampanye *Greenpeace*.

Moratorium telah membantu memperbaiki sektor hutan Indonesia. Namun untuk benar-benar menciptakan masa depan yang lebih baik untuk hutan dan masyarakat Indonesia, moratorium ini harus melangkah lebih jauh.⁶ Pada bulan Agustus 2019 pemerintah Indonesia berencana membuat moratorium izin baru pengelolaan hutan dan lahan gambut menjadi permanen.⁷

Moratorium yang sebelumnya hanya diperbarui setiap dua tahun sekali kini dipermanenkan melalui Instruksi Presiden tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Namun menurut *Greenpeace* moratorium tersebut masih memiliki banyak celah dan tidak menghasilkan perlindungan hutan atau lahan

gambut yang maksimal. Analisis pemetaan *Greenpeace* menunjukkan bahwa dalam kenyataannya tingkat deforestasi telah meningkat di area hutan yang berada di bawah moratorium sejak pemberlakuan moratorium.⁸

KERANGKA TEORI

a. Perspektif : Pluralis

Untuk memudahkan dalam melaksanakan penelitian ini, maka penulis akan menggunakan perspektif. Perspektif yang penulis gunakan yaitu Pluralis, Kaum Pluralis memandang Hubungan Internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja, tetapi juga merupakan hubungan antar individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal.⁹

b. Level Analisa : Perilaku Kelompok

Mohtar Mas'ood membagi tingkat level analisa menjadi lima, diantaranya *Pertama* perilaku individu yang berfokus kepada sikap dan perilaku tokoh-tokoh utama seperti kepala pemerintah, menteri luar negeri, penasehat militer dan lain-lain. *Kedua* perilaku kelompok fokus utamanya adalah perilaku kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang terlibat di dalam

⁶ WRI INDONESIA, "2 Hal Yang Perlu Diketahui Tentang Moratorium Hutan Indonesia", pada tanggal 5 Agustus 2021 diakses melalui <https://wri-indonesia.org/id/blog/2-things-you-need-know-about-indonesias-forest-moratorium> Pukul 16.00 WIB

⁷ WRI INDONESIA, "Jokowi Telah Berlakukan Permanen Moratorium Izin Hutan. Ini Tiga Keuntungannya Bagi Indonesia", pada tanggal 5 Agustus 2021 diakses melalui <https://wri-indonesia.org/id/blog/jokowi-telah-berlakukan-permanen-moratorium-izin-hutan-ini-tiga-keuntungannya-bagi-indonesia> pukul 16.29 WIB

⁸ *Greenpeace* Indonesia, "Briefing – Indonesia: Deforestasi Meningkat di Area-Area yang dilindungi oleh Moratorium" pada tanggal 7 Agustus 2021 diakses melalui <https://www.Greenpeace.org/indonesia/publikasi/3491/indonesia-deforestasi-meningkat-di-area-area-yang-dilindungi-oleh-moratorium/> pukul 17.35 WIB

⁹ Dori Gusman, "Peran *Greenpeace* dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan (Polusi Udara dan Air) di China", pada tanggal 7 Agustus 2021 diakses melalui <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/viewFile/2708/2656> pukul 20.21 WIB

hubungan internasional. *Ketiga* negara-bangsa yang difokuskan kepada proses pembuatan tentang hubungan internasional yaitu politik luar negeri sebagai suatu kesatuan yang utuh. *Keempat* pengelompokan negara yang fokusnya adalah pengelompokan negara-negara di bidang regional maupun global, yang berupa aliansi, persekutuan ekonomi dan perdagangan. *Kelima* sistem internasional fokus kajiannya adalah sistem internasional itu sendiri untuk menentukan perilaku-perilaku aktor Hubungan Internasional.

Penulis menggunakan level analisa perilaku kelompok didalam penelitian ini karena adanya organisasi internasional yang terlibat di dalam penelitian ini. Definisi organisasi internasional adalah suatu pola kerjasama yang melintasi batas-negara pada struktur organisasi yang jelas.¹⁰

c. Teori : Peran NGO

Teori yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah teori peran organisasi internasional (NGO). Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*, bahwa Organisasi Internasional didefinisikan sebagai struktur berkelanjutan dan formal yang di bentuk dari kesepakatan antar anggota-anggota atau pemerintah dengan non pemerintah dari dua negara yang berdaulat atau lebih dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama.¹¹

Clive Archer menjelaskan bahwa peranan organisasi internasional dapat dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu:

1. Sebagai instrumen yaitu organisasi internasional digunakan oleh negara anggotanya guna mencapai tujuan tertentu.

2. Sebagai arena yaitu organisasi internasional digunakan untuk tempat berkumpul dan bertemu anggotanya guna mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi.
3. Sebagai aktor independen yaitu organisasi internasional dapat membuat keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh paksaan dari luar organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran *Greenpeace* dalam Menangani Kerusakan Hutan pada Masa Moratorium Hutan di Indonesia.

Permasalahan pengrusakan hutan yang terus terjadi di Indonesia menyebabkan kerusakan lingkungan dan ketidak seimbangan pada alam. Hal ini menarik perhatian dari salah satu organisasi internasional yang bergerak di bidang lingkungan yaitu *Greenpeace*. Kampanye mengenai hutan masih menjadi fokus utama kampanye *Greenpeace* di Indonesia selain itu *Greenpeace* memiliki fokus kampanye lain yaitu laut dan terumbu karang, plastik, dan polusi udara di Indonesia sejak tahun 2019 hingga 2020.¹²

Team kampanye untuk hutan *Greenpeace* di Indonesia memang lebih banyak dikarenakan posisi Indonesia sebagai negara tropis dan memiliki hutan yang luas. *Greenpeace* memiliki kampanye dengan tujuan “Zero Deforestation” yaitu bagaimana kampanye *Greenpeace* berupaya agar semua pihak dapat menghentikan deforestasi yang terjadi.

Dari salah satu pendekatan *Zero Deforestation* adalah pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi

¹⁰ Mas'oed Mohtar, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi", (Jakarta: LP3ES, 1994).

¹¹ Clive Archer, "International Organizations; Third Edition", Routledge, New York, 2001, hal. 35.

¹² *Greenpeace* Indonesia, "Tantangan Kita Bersama di Tahun 2020" diakses pada 02 Januari melalui <https://www.Greenpeace.org/indonesia/cerita/4544/tantangan-kita-bersama-di-tahun-2020/> pukul 01:17 WIB

deforestasi yang terjadi yaitu salah satunya kebijakan moratorium hutan. *Greenpeace* aktif berkampanye untuk mendukung pemerintah agar segera mengeluarkan moratorium hutan. Pada 2011 akhirnya ditanda tangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono moratorium hutan mengenai “Penghentian pemberian izin hutan alam primer dan lahan gambut”.

Sampai saat ini masih terus diperpanjang hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan pada tahun 2019 moratorium hutan sudah dipermanenkan. Untuk kampanye yang dilakukan *Greenpeace* terkait dengan kebijakan moratorium hutan di Indonesia *Greenpeace* sebagai INGO berperan sebagai Aktor Independen, Arena, dan Instrumen.¹³

1. Greenpeace sebagai Instrumen

Peran organisasi internasional sebagai instrumen berarti sebuah organisasi internasional dapat menjadi alat atau instrument bagi negara-negara anggotanya untuk dapat mewujudkan kepentingannya. Sebagai Instrumen *Greenpeace* Indonesia berupaya untuk mengungkap data-data kerusakan hutan kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia pada saat berlakunya moratorium itu sendiri.

Greenpeace juga melakukan kampanye terkait fakta bahwa kerusakan hutan masih terus terjadi setelah adanya kebijakan moratorium hutan. Kampanye yang dilakukan *Greenpeace* adalah Kepak Sayap Enggang Mata Harimau di Sumatera dan Kalimantan dimana kampanye ini juga dilakukan bekerjasama dengan beberapa NGO yang bergerak di bidang lingkungan lain.

a. Kampanye Tur Mata Harimau di Sumatera

Kampanye Tur Mata Harimau (*Eyes of Tiger Tour*) di Sumatera merupakan gabungan dari tim *Greenpeace* Indonesia, WALHI (Wahana Lingkungan Indonesia), WARSI/KKI (Komunitas Konservasi Indonesia) dan Wahana Bumi Hijau Sumatera Selatan. Tur ini dilaksanakan mulai dari September hingga Oktober 2011 di tiga provinsi yaitu Jambi, Riau dan Sumatera Selatan. Dengan melakukan “road show” pada kementrian terkait untuk memaparkan data-data temuan selama sebulan di lapangan.

Temuan dari Tim Mata Harimau edisi Sumatera ini menunjukkan bahwa semasa berlakunya moratorium hutan atau bahkan setelah adanya kebijakan moratorium hutan, perusakan pada hutan tetap masih terjadi di wilayah sumatera. Kemudian tur ini berakhir dengan mengunjungi menteri kehutanan Zulkifli Hassan, sekretariat negara, UKP4 dan Kementerian Lingkungan hidup untuk mengemukakan temuan-temuan di lapangan dan berharap ada kebijakan tegas dari pemerintah untuk memperkuat kebijakan moratorium yang telah diberlakukan serta izin yang telah dikeluarkan.¹⁴

b. Kampanye Kepak Sayap Enggang Tur Mata Harimau Kalimantan

Kepak Sayap Enggang Tur Mata Harimau merupakan kampanye lanjutan dari Tur Mata Harimau yang dilaksanakan pada September 2012. Tur Kepak Sayap Enggang-Mata Harimau seri Kalimantan akan menjelajahi tiga provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Tur ini menggunakan

¹³ Arie Rompas, Wawancara. 11 November 2021. Pukul 16: 05 WIB

¹⁴ Arie Rompas, Wawancara. 11 November 2021. Pukul 16:10 WIB

tema Burung Enggang Gading yang sekaligus sebagai simbol budaya masyarakat Kalimantan yang juga terancam punah sama halnya dengan Harimau Sumatera.

Greenpeace bersama WALHI Kalimantan Selatan, Pena Hijau, SOB, Foker SHK dan Aman Kalimantan Tengah akan melihat langsung kondisi hutan alam Indonesia, Kampanye ini juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga dan mengawasi hutan alam agar hutan alam yang tersisa dapat terhindar dari berbagai kerusakan. Selama dilapangan tim mendapatkan temuan hutan-hutan di Kalimantan mulai hilang akibat kebakaran hutan, ekspansi kelapa sawit dan kegiatan pertambangan, masih banyak ditemui tumpang tindih kawasan hutan.

c. Greenpeace Mengungkap data kerusakan hutan selama berlakunya Moratorium

Temuan dalam wilayah indikatif moratorium bahwa pada tahun 2018 angka deforestasi berkurang pada revisi 15 menjadi 19,7% dan pada tahun 2019 di angka 22,2% yang artinya masih terjadi penghilangan tutupan hutan di wilayah hutan yang dilindungi moratorium

Revisi-revisi ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ditetapkan peta indikatif moratorium tetapi deforestasi masih terus terjadi di wilayah-wilayah itu. Pada tahun 2017,2018,2019 terjadi pengurangan di wilayah moratorium yang telah ditetapkan dalam peta indikatif moratorium.¹⁵

Greenpeace Indonesia mengeluarkan hasil analisis terbaru mengenai hilangnya tutupan hutan selama berlakunya moratorium khususnya pada tahun 2017 hingga 2019. Melalui data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Greenpeace melalui websitenya mengeluarkan data berikut:

Tabel Hilangnya Tutupan Hutan

Indonesia 2017-2019 ¹⁶

ISLAND	FOREST COVER LOSS 2019 (HA)		PERCENTAGE
	IN MORATORIUM 2019	IN TOTAL ISLAND	
KALIMANTAN	15,161.73	147,410.3	10.3%
SUMATERA	29,320.64	83,006.9	35.3%
PAPUA	11,411.47	34,747.3	32.8%
SULAWESI	14,362.72	41,845.1	34.3%
MALUKU	1,204.75	15,279.9	7.9%
TOTAL	71,461.30	322,289.44	22.2%

ISLAND	FOREST COVER LOSS 2018 (HA)		PERCENTAGE
	IN MORATORIUM rev 15	IN TOTAL ISLAND	
KALIMANTAN	11,713.31	159,132.2	7.4%
SUMATERA	33,147.63	94,399.3	35.1%
PAPUA	10,914.90	37,816.2	28.9%
SULAWESI	10,058.01	35,965.6	28.0%
MALUKU	1,239.88	12,500.1	9.9%
TOTAL	67,073.72	339,813.33	19.7%

ISLAND	FOREST COVER LOSS 2017 (HA)		PERCENTAGE
	IN MORATORIUM rev 13	IN TOTAL ISLAND	
KALIMANTAN	14,347.64	153,160.2	9.4%
SUMATERA	42,221.57	123,485.7	34.2%
PAPUA	11,873.45	44,265.2	26.8%
SULAWESI	12,926.54	41,658.0	31.0%
MALUKU	1,257.91	10,464.0	12.0%
TOTAL	82,627.11	373,032.95	22.2%

Dari tabel diatas terlihat bahwa deforestasi masih terjadi di wilayah hutan yang dilindungi oleh moratorium hutan. Sumatera dan Kalimantan masih memiliki angka deforestasi tertinggi. Deforestasi seharusnya tidak terjadi lagi pada hutan yang dilindungi oleh moratorium.

2. Greenpeace sebagai Arena

Peran Organisasi Internasional sebagai Arena atau tempat yaitu sebuah

¹⁵ Arie Rompas, Wawancara. 11 November 2021. Pukul 16:22 WIB

¹⁶ Greenpeace Indonesia, "Kehilangan Hutan Indonesia Masih Terjadi di Kawasan Dilindungi, Moratorium Hutan Perlu Diperkuat" diakses pada 9 Januari 2022 melalui <https://www.Greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/5170/kehilangan-hutan-indonesia-masih-terjadi-di-kawasan-dilindungi-moratorium-hutan-perlu-diperkuat/> pukul 00:30WIB

organisasi dapat menjadi wadah bagi para anggotanya untuk berinteraksi dan merumuskan secara bersama-sama kepentingan masing-masing anggota. Interaksi ini bisa dalam berbagai bentuk diantaranya berdiskusi, bekerjasama ataupun berargumentasi.¹⁷

Greenpeace berperan sebagai arena dengan mengadakan pertemuan dengan pemerintah Indonesia dan dengan Organisasi yang bergerak di bidang lingkungan lainnya. Guna membahas persoalan mengenai kerusakan hutan yang masih terjadi di area-area yang dilindungi oleh moratorium hutan akibat deforestasi.

Bekerjasama dengan beberapa Organisasi Lingkungan lainnya, seperti pada saat melaksanakan Tur Mata Harimau di Sumatera *Greenpeace* Indonesia bekerjasama dengan WALHI (Wahana Lingkungan Indonesia), WARSI/KKI (Komunitas Konservasi Indonesia) dan Wahana Bumi Hijau Sumatera Selatan.

Pada saat Kampanye Kepak Sayap Enggang Tur Mata Harimau di Kalimantan *Greenpeace* bekerjasama WALHI Kalimantan Selatan, Pena Hijau, SOB, Foker SHK dan Aman Kalimantan Tengah. Kampanye Tur Mata Harimau yang dilaksanakan di Sumatera berakhir di KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyerahkan hasil temuan tim *rider* Mata Harimau Sumatera selama dilapangan kepada Menteri Kehutanan pada saat itu Bapak Zulkifli Hassan. Selain menyerahkan hasil temuan *Greenpeace* juga meminta kepada Menteri Kehutanan untuk dapat memperkuat kebijakan-kebijakan moratorium hutan yang telah ada sebelumnya.¹⁸

Selain aksi melalui kampanye, *Greenpeace* juga memiliki kegiatan yaitu aksi langsung yaitu "*Bring Giveness*" yaitu

team *Greenpeace* langsung datang ke lokasi dan kemudian menyampaikan pesan-pesan dari lokasi.¹⁹ Berikut salah satu aksi langsung yang dilakukan *Greenpeace* di hutan kawasan moratorium yang rusak akibat deforestasi.

3. *Greenpeace* sebagai Aktor Independen

Sebuah Organisasi Internasional sebagai Aktor Independen diartikan dalam konteks sebuah organisasi internasional dapat menjadi aktor yang memiliki kapasitas untuk bertindak dalam tingkat global tanpa disertai intervensi signifikan dari luar organisasi. Peran *Greenpeace* sebagai aktor independen yaitu menyatakan permasalahan kerusakan hutan akibat deforestasi dapat mengganggu keseimbangan ekosistem alam, merusak habitat satwa langka dan merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

Maka dari itu *Greenpeace* melakukan kampanye, mengungkap data dan melakukan riset mengenai hutan yang rusak akibat deforestasi di kawasan moratorium hutan untuk mencari solusi dalam mengatasi kerusakan hutan akibat deforestasi dengan mendesak pemerintah untuk memperkuat regulasi kebijakan moratorium hutan dan menerapkan penegakan hutan yang serius bagi pelanggar izin.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa *Zero Deforestation* itu terwujud di Indonesia yang artinya pembangunan-pembangunan dengan mengalih fungsikan hutan secara besar-besaran sudah harus dihentikan. Deforestasi dengan mengalihkan fungsi hutan untuk kepentingan membuka lahan yang dapat mengganggu ekosistem alam harus beralih ke model pembangunan yang berkelanjutan, ramah bagi lingkungan dan bermanfaat bagi manusia. Artinya kita harus memiliki tanggung jawab yang lebih

¹⁷ Archer, *International Organization*, 68-69

¹⁸ Arie Rompas, Wawancara. 11 November 2021. Pukul 16:15 WIB

¹⁹ Arie Rompas, Wawancara. 11 November 2021. Pukul 16:20 WIB

serius itu untuk menghentikan pengrusakan bumi termasuk menghentikan deforestasi.²⁰

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agung, A., Perwita, B., & Yani, Y. M. (2006). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. *Bandung*: PT Remaja Rosdakarya.

Archer, C. (2014). *International organizations*. London : Routledge

Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jackson, R., & Sorensen, G. (2005). Pengantar Studi Hubungan Internasional (terj. Dadan Suryadipura, *Introduction to International Relations*). Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Mas' oed, M. (1994). *Ilmu hubungan internasional: disiplin dan metodologi*. Jakarta : PT Pustaka LP3ES.

Mas' oed, M. (1989). *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta: PAU-Studi Sosial UGM.

Muhajir, M., & Safitri, M. A. (2010). *REDD di Indonesia Kebijakan Pemerintah dan Kerentanan Masyarakat* dalam Mumu Muhajir (ed), *REDD di*

Indonesia kemana Akan Melangkah, Studi Tentang Kebijakan Pemerintah dan Kerentanan Masyarakat, Jakarta: HuMa.

Rudy, T. M. (2009). *Administrasi dan Organisasi internasional*. Bandung: Angkasa.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Ulber, S. (2009). *Metode Penelitian Sosial*, Bandung-Indonesia: PT. Refika Aditama

Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.

Laporan

Austin, K., Sheppard, S. T. U. A. R. T., & Stolle, F. R. E. D. (2012). *Indonesia's moratorium on new forest concessions: key findings and next steps*. World Resources Institute.

Forest Watch Indonesia (2018). *Angka Deforestasi sebagai "Alarm" Memburuknya Hutan Indonesia*. FWI, Bogor.

Forest Watch Indonesia (2020), *Jalan Deforestasi Indonesia*, https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2020/09/Jalan-Deforestasi-Indonesia_FWI_2020-1.pdf
FWI, Bogor

Jaya, I. I. N. S., Hidayati, N., Suhadi, Z., Rozani, A., Rompas, A., Nauli, M., ... & Puteri, J. *Analisis Kebijakan*

²⁰ Arie Rompas, Wawancara. 11 November 2021. Pukul 16:17 WIB

- Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.*
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019) *“Deforestasi Indonesia 2017-2018”*
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019) *“Deforestasi Indonesia 2019-2020”*
- Sunderlin, W. D., & Resosudarmo, I. A. P. (1997). *Laju dan penyebab deforestasi di Indonesia: penelaahan kerancuan dan penyelesaiannya.* Centre for International Forestry Research.
- SARAINI, M. (2017). *Kerjasama Pemerintah Indonesia Dan Amerika Serikat Melalui Program TFCA-SUMATERA Dalam Konservasi Kawasan Hutan Leuser Aceh* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Jurnal**
- Aji, S. B. (2019). *Moratorium Sawit Jokowi dalam Perspektif Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan ala Politik Hijau.* *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(2)
- Arif, A. (2016). Analisis yuridis pengrusakan hutan (deforestasi) dan degradasi hutan terhadap lingkungan. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 3(1)
- Ardhana, I. P. G. (2016). Dampak laju deforestasi terhadap hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia. *Metamorfosa: Journal of Biological Sciences*.
- Berliani, H., Waluyo, J., Prameswari, A., Syarif, L. M., & Hardiyanto, G. (2016). *Penguatan Kebijakan Moratorium Perizinan di Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.*
- Butarbutar, T. (2016). *Catatan kesiapan Indonesia untuk skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.* *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*
- Angi, E. M., & Wiati, C. B. (2017). *Kajian Ekonomi Politik Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.* *Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa*, 3(2).
- Gusman, D., & Waluyo, T. J. (2015). *Peran Greenpeace dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan (Polusi Udara dan Air) di China.* *Transnasional*, 6(2)
- Siswoko, B. D. (2008). *Pembangunan, Deforestasi dan Perubahan Iklim (Development, Deforestation and Climate Change).* *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 14(2)
- Soedarso, B. P. (2015). *Perspektif Keadilan Lingkungan Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Hutan Dan Moratorium Kehutanan.* *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*
- Virgy, M. A., Djuyandi, Y., & Darmawan, W. B. (2020). *Greenpeace Indonesia's Transnational Advocacy Network Strategy Regarding the Issue of Deforestation in Indonesia's Forests by Wilmar International.* *Journal of Political Issues*, 1(2)

Wahyuni, H., & Suranto, S. (2021). *Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia*. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1)

Waluyo, T. J., & Pahlawan, I. (2018). *Kerja Sama Indonesia Dan Center For International Forestry Research (CIFOR). Prosiding Seminar Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FISIP Universitas Riau*.

Widiatma, A. P., & Halimatussadiah, A. (2019). *KEBIJAKAN MORATORIUM PEMANFAATAN GAMBUT: POTENSI MANFAAT EKONOMI DAN LINGKUNGAN UNTUK HUTAN TANAMAN INDUSTRI*. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol*, 16(2).

Wulan, R. M., & Muktiali, M. (2013). *Peran Non Governmental Organization (GIZ dan LSM Bina Swadaya) terhadap Klaster Susu Sapi Perah di Kabupaten Boyolali*. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 1(2).

Yudhanegara, R. A. (2021). *Forest Moratorium Policy, Deforestation and Forest Degradation in Papua Province*. *Jurnal Planoeearth*, 6(1).

Yusrifan, F. (2017). *Strategi Greenpeace Melindungi Hutan Indonesia Tahun 2007-2015*. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6(2).

Website dan Artikel

BPHN, “Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005”, <https://www.bphn.go.id/data/documents/05ip004.pdf> (diakses 16 November 2021)

BPK (Badan Pengawas Keuangan) “PP 6/2007 jo PP 3/2008 tentang “Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan” <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4727> (diakses 16 November 2021)

BPK RI, “Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 10 Tahun 2011” <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/11355/inpres-no-10-tahun-2011#:~:text=INPRES%20No.%2010%20Tahun%202011,Lahan%20Gambut%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>, (diakses 17 November 2021)

BPKH Badan Kesatuan Pengelolaan Hutan, “Tentang KPH”, <http://bpkh21.or.id/kph.html> (diakses 17 November 2021)

Data Boks, *Hutan Indonesia Berkurang 2,1 Hektar Sepanjang 2015-2020*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/hutan-indonesia-berkurang-21-hektar-sepanjang-2015-2020> (diakses 16 November 2021)

Ditjenppi MENLHK “REDD+” <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/aksi/redd> (diakses 16 November 2021)

CIFOR Indonesia, *Moratorium Hutan Indonesia: Btau Loncatan Untuk Memperbaiki Tata Kelola Hutan?*, <https://www.cifor.org/knowledge/publication/3631/> (diakses 4 Agustus 2021)

Ditjen PPI- KLHK, *Komitmen Indonesia Dalam Pengendalian Perubahan*

- Iklm*,
<http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/tentang/amanat-perubahan-iklim/komitmen-indonesia> (diakses 4 Agustus 2021)
- Ditjen PPI-LHK, Pertanyaan Seputar REDD+ dan Implementasi REDD+ Di Indonesia,
<http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/33-beranda/1804-faq.html> (diakses 3 Oktober 2021)
- Forest Watch Indonesia, “ Enam Tahun Memperbaiki Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut”<https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2017/05/Kertas-Kebijakan-Moratorium.pdf> (diakses 17 November 2021)
- Forest Watch Indonesia, ”Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000-2009” https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2013/02/PHKI_2000-2009_FWI_low-res.pdf (diakses 16 November 2021)
- Forest Watch Indonesia, *Keadaan Hutan Indonesia*, fwi.or.id/wp-content/uploads/2011/07/phki-2001-fwi-low-res.pdf (diakses 15 November 2021)
- Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, *Lika-Liku Pelaksanaan REDD+ Di Indonesia : Efektifkah Atasi Deforestasi?*
<https://fh.unpad.ac.id/lika-liku-pelaksanaan-redd-di-indonesia-efektifkah-atasi-deforestasi/> (diakses 4 Agustus 2021)
- Greenpeace, *About Us*,
<https://www.Greenpeace.org/usa/about/> (diakses 3 Oktober 2021)
- Greenpeace Indonesia, *Analisis Greenpeace: menunjukkan satu juta hektar hutan terbakar di dalam area moratorium hutan*,
<https://www.Greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/3506/analisis-Greenpeace-menunjukkan-satu-juta-hektar-hutan-terbakar-di-dalam-area-moratorium-hutan/> (diakses 7 Agustus 2021)
- Greenpeace Indonesia, *Briefer – Indonesia: Deforestasi Meningkat di Area-Area yang dilindungi oleh Moratorium*,
<https://www.Greenpeace.org/indonesia/publikasi/3491/indonesia-deforestasi-meningkat-di-area-area-yang-dilindungi-oleh-moratorium/> (diakses pada 7 Agustus 2021)
- Greenpeace International, *Our Core Values*,
<http://www.Greenpeace.org/international/en/about/our-core-values/> (diakses 5 Agustus 2021)
- Greenpeace Indonesia, *Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir*,
<https://www.Greenpeace.org/indonesia/publikasi/44219/karhutla-dalam-lima-tahun-terakhir/> (diakses 15 November 2021)
- Greenpeace Indonesia, *Laju Deforestasi Tinggi di Hutan Alam, Presiden Jokowi Harus Evaluasi Kinerja KLHK*,
<https://www.Greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/5016/laju-deforestasi-tinggi-di-hutan-alam-presiden-jokowi-harus-evaluasi-kinerja-klhk/> (diakses 15 November 2021)
- Greenpeace Indonesia, *Penjaga Hutan “Apa Yang Terjadi Di Hutan Indonesia?,*
<https://www.Greenpeace.org/indonesia/aksi/penjaga-hutan/> (diakses 15

November 2021)

Greenpeace Indonesia, “ Sejarah Greenpeace Awal Mula Greenpeace “<https://www.Greenpeace.org/indonesia/sejarah-Greenpeace/> (diakses 10 Desember 2021)

Greenpeace International, “ Fifty Years of Greenpeace”, #50 Years - Greenpeace International (diakses 9 Desember 2021)

Greenpeace,” History and Successes” , <https://www.Greenpeace.org/southeastasia/history-and-successes/> (diakses 10 Desember 2021)

Greenpeace International, “Our Governance: How is Greenpeace International Governed?”,<https://www.Greenpeace.org/international/explore/about/governance/> (diakses 10 Desember 2021)

Greenpeace Indonesia, “Pendanaan” <https://www.Greenpeace.org/indonesia/pendanaan/> (diakses 10 Desember 2021)

Greenpeace Indonesia, “Direct Dialogue Campaigner (Street Fundraiser)” <https://www.Greenpeace.org/indonesia/aksi/berdonasi/ddc/> (diakses 11 Desember 2021)

Greenpeace Indonesia, “Telefundraising”, <https://www.Greenpeace.org/indonesia/aksi/berdonasi/tfr/> (diakses 11 Desember 2021)

Greenpeace Indonesia, “DonasiOnline”, <https://www.Greenpeace.org/indonesia/aksi/berdonasi/online/> (diakses 11 Desember 2021)

Greenpeace “Mission and Values”<https://www.Greenpeace.org/eastasia/mission-values/#:~:text=Greenpeace's%20goal%20is%20to%20ensure,and%20corporations%20around%20the%20world> (diakses 11 Desember 2021)

Greenpeace International “Our Values”, <https://www.Greenpeace.org/international/explore/about/values/> (diakses 11 Desember 2021)

Greenpeace, “Greenpeace launches project to protect Citarum River”, <https://www.Greenpeace.org/southeastasia/press/612/Greenpeace-launches-project-to-protect-citarum-river/> (diakses 12 Desember 2021)

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Deforestasi

Indonesia Turun, Terendah Dalam Sejarah, https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3640/deforestasi-indonesia-turun-terendah-dalam-sejarah (diakses 4 Agustus 2021)

MENLHK PPID, “KLHK Terbitkan PIPPIB Revisi XIV” <http://ppid.menlhk.go.id/berita/berita-foto/1276/klhk-terbitkan-pippib-revisi-xiv> (diakses 17 November 2021)

MENLHK, “Sistem Verifikasi Legalitas Kayu” https://www.menlhk.go.id/site/single_post/1547/Pukul (diakses 17 November 2021)

UNFCCC, Files Meetings Decision -/CP.13 “Bali Action Plan” https://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cp_bali_action.pdf (diakses 16 November 2021)

Mongabay, “Peta Jalan Pemulihan Laut Indonesia : Sebuah Kebutuhan Mendesak” <https://www.mongabay.co.id/2013/10/17/peta-jalan-pemulihan-laut-indonesia-sebuah-kebutuhan->

- mendesak/ (diakses 12 Desember 2021)
- Tempo Indonesia, “*Greenpeace Indonesia Susun Peta Pemulihan Laut*”, <https://nasional.tempo.co/read/522061/Greenpeace-indonesia-susun-peta-pemulihan-laut/full&view=ok> (diakses 12 Desember 2021)
- WALHI, *Fakta dan Kelemahan Moratorium*, <https://www.walhi.or.id/fakta-dan-kelemahan-moratorium> (diakses 5 Agustus 2021)
- WRI INDONESIA, *2 Hal Yang Perlu Diketahui Tentang Moratorium Hutan Indonesia*, <https://wri-indonesia.org/id/blog/2-things-you-need-know-about-indonesias-forest-moratorium/> (diakses 5 Agustus 2021)
- WRI INDONESIA, *Hutan- Hutan Indonesia : Apa Yang Dipertaruhkan?*, [https://wri-indonesia.org/sites/default/files/keadaan hutan bab 1.pdf](https://wri-indonesia.org/sites/default/files/keadaan%20hutan%20bab%201.pdf) (diakses 4 Agustus 2021).
- WRI INDONESIA, *Jokowi Telah Berlakukan Permanen Moratorium Izin Hutan. Ini Tiga Keuntungannya Bagi Indonesia*, <https://wri-indonesia.org/id/blog/jokowi-telah-berlakukan-permanen-moratorium-izin-hutan-ini-tiga-keuntungannya-bagi-indonesia/> (diakses 5 Agustus 2021)